

Jurnal Studia

Akuntansi dan Bisnis

ISSN: 2337-6112

Vol. 8 | No.1

PERAN AKUNTAN DAN PERUSAHAAN MENUJU TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS / SDGs*) 2030

Budi Karyanto * Rina Martiana **

* STIE BISMA LEPISI, Tangerang

** STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

Article Info

Keywords:

Role Of Accountant,
Sustainable Development
Goals

Abstract

One of the most effective things in achieving sustainable development goals is utilizing and allocating taxes obtained by the government from companies for the development of remote areas that are still lagging behind.

Therefore, the first thing that must be emphasized and done endlessly is to eradicate corruption, so that government funds can be used optimally for the purpose of sustainable development, alleviating all forms of wealth in all places that can be used for nutrition, and promoting sustainable agriculture. How to live a healthy and prosperous life, quality education, clean air and proper sanitation, decent work and economic growth, namely, sustainable and inclusive economic growth, employment and decent work for all. Until finally the infrastructure is strong, and its responsiveness is in the areas between the regions of this motherland.

Corresponding Author:

budhyka@gmail.com
rinamartiana30@gmail.com

To achieve something in particular. The goal of sustainable development (SDGs) is not only the task of the government alone, but also the task of the whole world community, especially governments and companies (assisted by accountants) in their vision and mission to achieve SDGs. Through accountability, transparency and mutual trust and commitment from all parties, surely anything will be achieved.

Pendahuluan

Latar Belakang

Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi kebijakan-kebijakan.. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi.

Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan. Untuk mengubah tuntutan ini menjadi aksi nyata, para pemimpin dunia bertemu pada 25 September 2015, di Markas PBB di New York untuk memulai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Tujuan ini diformulasikan sejak 19 Juli 2014 dan diajukan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Kelompok Kerja Terbuka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam proposal ini terdapat 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut.

Perkembangan teknologi informasi yang mendorong lahirnya Revolusi Industri 4.0 telah mengubah sebagian besar *business model* yang ada hari ini. TI sebagai *tools* telah melahirkan cara pandang baru dalam melihat informasi sebagai alat pengambilan keputusan dan menjadikan asset berharga untuk memastikan entitas tetap relevan dalam dinamika ekonomi global.

Profesi akuntansi memiliki kemampuan unik dan spesial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam pertumbuhan ekonomi secara global. Selain itu, profesi akuntan juga memiliki kemampuan yang relevan dalam upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan bisa memastikan negara dan perusahaan memiliki kemampuan untuk mengukur kemajuan, memantau ekses dari perkembangan yang terjadi, serta melaporkan pencapaian di bidang – bidang terkait pengentasan kemiskinan, melindungi bumi dari resiko hilangnya sumber daya, dan memastikan kemakmuran bagi semua penghuninya.

Akuntan bisa menjadi petunjuk arah bagaimana negara dan perusahaan menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dinamika ini menjadi latar

penyelenggaraan kongres XIII IAI pada 4 – 6 Desember mendatang di Jakarta. Mengusung tema “Peran Inklusif Akuntan dan Perusahaan Menuju SDGs 2030”, Akuntan Profesional Indonesia dituntut kesiapannya menghadapi perubahan global yang sedang terjadi.

Deskripsi Teori

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*

a. Pengertian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggang yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Gambar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-off-with-start-of-new-year/>

Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

- 1) Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan yaitu, pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
- 2) Tujuan 2 - Tanpa kelaparan yaitu, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera yaitu, menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

- 4) Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas yaitu, memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- 5) Tujuan 5 - Kesetaraan gender yaitu, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
- 6) Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak yaitu, menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
- 7) Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau yaitu, memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- 8) Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yaitu, mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
- 9) Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur yaitu, membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
- 10) Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan yaitu, mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- 11) Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan yaitu, membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- 12) Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab yaitu, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan .
- 13) Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim yaitu, mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Tujuan 14 - Ekosistem laut yaitu, pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan .
- 15) Tujuan 15 - Ekosistem daratan yaitu, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- 16) Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh yaitu, mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
- 17) Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan yaitu, menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut *Accountancy* di en.wikipedia.org. adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis".

Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi di mana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Auditing, satu disiplin ilmu yang terkait tetapi tetap terpisah dari akuntansi, adalah suatu proses di mana pemeriksa independen memeriksa laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat atau opini - yang masuk akal tetapi tak dijamin sepenuhnya - mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Praktisi akuntansi dikenal sebagai akuntan.

b. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi :

- 1) Laporan Posisi Keuangan, adalah suatu daftar sistematis yang memuat informasi mengenai aset, hutang dan modal suatu perusahaan pada akhir periode tertentu. Disebut sebagai daftar yang sistematis, karena laporan disusun berdasarkan urutan tertentu. Dalam neraca dapat diketahui berapa jumlah kekayaan perusahaan, kemampuan perusahaan membayar kewajiban serta kemampuan perusahaan memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar. Selain itu juga dapat diperoleh informasi tentang jumlah utang perusahaan kepada kreditur dan jumlah investasi pemilik yang ada di dalam perusahaan tersebut.

- 2) Laporan Laba Rugi Komprehensif, adalah ikhtisar mengenai pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu, sehingga dapat diketahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami.
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas, adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal untuk periode tertentu, mungkin satu bulan atau satu tahun. Melalui laporan perubahan modal dapat diketahui sebab-sebab perubahan modal selama periode tertentu.
- 4) Laporan Arus Kas, dengan adanya laporan ini pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan kas dimasa mendatang.
- 5) Catatan atas laporan keuangan, merupakan daftar rincian secara jelas yang ada di dalam laporan keuangan yang berfungsi sebagai penjelasan mengenai rincian sebuah akun dalam laporan keuangan secara detail.

c. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

d. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)

Standar Akuntansi Keuangan atau SAK adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini tercermin dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan. Standar ini digunakan untuk entitas atau perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia. Setidaknya ada beberapa PSAK yang dapat digunakan atau menjadi perhatian perusahaan yang memasukan SDGs ke dalam laporan keuangan:

a. PSAK no. 19 Aset Tak Berwujud

Mengatur persyaratan bagaimana perusahaan dapat mengkapitalisasi biaya pengembangan dan mengakuinya menjadi asset tak berwujud.

Entitas sering kali mengeluarkan sumber daya maupun menciptakan liabilitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan, atau peningkatan sumber daya tidak berwujud semisal teknologi, design dan merk dagang. Misalnya merk dagang dari suatu air mineral pegunungan yang mungkin berhubungan dengan suatu mata air tertentu dan tidak dapat dijual terpisah dari mata airnya.

Mempertimbangkan SDGs bukan hanya selalu ekstra biaya yang harus dibebankan. Kepedulian SDGs juga banyak membuka peluang bisnis baru. Seperti peluang bisnis untuk energi terbarukan, bisnis berbasis platform yang memangkas rantai nilai tradisional, atau produk – produk agrikultur premium seperti bahan makanan organik. Masyarakat dunia sekarang juga semakin peduli dengan kelestarian lingkungan menuntut produk – produk bersertifikat ramah lingkungan, juga menuntut inovasi produk yang lebih hemat energi.

b. PSAK no. 24 Imbalan Kerja

Secara umum PSAK 24 adalah mengatur pernyataan akuntansi tentang imbalan kerja di perusahaan. Secara umum mengatur mengenai tata cara pemberian imbalan-imbalan di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang sampai dengan imbalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PSAK No. 24 mengharuskan perusahaan untuk membukukan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja dalam laporan keuangannya. Pernyataan ini mengharuskan pemberi kerja (entitas) untuk mengakui liabilitas dan beban.

c. PSAK no. 48 Penurunan Aset

Mengatur mengenai perlakuan yang diterapkan untuk peristiwa penurunan aset. Hal ini sudah dijelaskan dalam tujuan dan ruang lingkup dari PSAK no 48 yaitu disebutkan bahwa tujuannya adalah menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah yang terpulihkannya. Penentuan apakah suatu aset yang mengalami revaluasi mengalami penurunan nilai tergantung pada dasar yang digunakan dalam menentukan nilai wajar.

Dengan sumber daya alam yang semakin terbatas dan teknologi yang semakin maju, perusahaan dituntut untuk semakin cepat beradaptasi dengan teknologi apabila ingin memiliki bisnis yang berkelanjutan. Perubahan teknologi dapat mengubah asset perusahaan menjadi using lebih cepat sehingga perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan PSAK 48 untuk mengukur penurunan nilai asset mereka.

d. PSAK no. 57 Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi

- 1) **Provisi** adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
- 2) Liabilitas kontinjensi adalah: kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
- 3) **Aset kontinjensi** adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

PSAK 57 menjelaskan bagaimana perusahaan harusnya membuat cadangan bila memiliki kewajiban konstruktif (bukan hanya kewajiban hukum) seperti misalnya komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan.

e. PSAK no. 60 Pengungkapan Berdasarkan Kelas Instrumen Keuangan

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan berdasarkan kelas instrumen keuangan, maka entitas mengelompokkan instrumen keuangan menjadi kelas-kelas sesuai dengan sifat informasi yang diungkapkan dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

Entitas menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi terhadap setiap pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan.

f. PSAK no. 71 Perubahan Persyaratan Terkait Instrumen Keuangan

PSAK 71 berlaku di Indonesia pada tahun 2020 meminta perusahaan melakukan pemodelan “ekspeted credit loss” dengan mempertimbangkan kemungkinan – kemungkinan gagal bayar sepanjang usia instrument keuangan. Instrumen keuangan tersebut merupakan adopsi dari IFRS 9 Financial Instruments yang dikeluarkan oleh

International Accounting Standard Board (IASB). ED PSAK 71 mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan kini tidak lagi berdasarkan intensi manajemen untuk menjual atau memiliki instrumen keuangan hingga jatuh tempo.

A. Pendapat

Profesi akuntansi seharusnya juga mendukung sektor publik yang lebih transparan dan bertanggung jawab kepada warganya. Melalui pelaporan keuangan yang efektif dan relevan, akuntan dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman pemerintah tentang posisi dan prospek fiskal mereka. Juga penting untuk memberikan pemahaman kepada legislator, pasar, dan warga negara, terkait informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan dan kebijakan yang efisien, serta meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kinerja mereka. Di sisi lain, peran penting profesi ini dibutuhkan untuk menghadapi ancaman signifikan dari korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Dengan adanya beberapa PSAK yang telah dijabarkan diatas berikut hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan, diantaranya:

1. PSAK 19

Kepedulian terhadap SDGs juga membuka banyak peluang bisnis baru, Seperti peluang bisnis terbarukan. Dikarenakan masyarakat dunia semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan jika memasukan SDGs sebagai salah satu visi misi mereka adalah nama baik (good will) yang merupakan asset tak berwujud bagi perusahaan.

2. PSAK 24

Salah satu target SDGs adalah kesetaraan jender (gender equality). Riset World Bank 2015 menunjukkan bahwa kesenjangan upah antara buruh perempuan dengan buruh laki – laki masing tinggi, terutama untuk buruh perempuan dengan tingkat pendidikan rendah. Kesetaraan jender bukan hanya issue upah perempuan yang disetarakan dengan laki – laki namun juga memberikan benefit yang setara untuk pekerja laki – laki. Perusahaan harus memberikan hak dan kewajiban yang setara untuk karyawan laki – laki dan perempuan.

3. PSAK 48

Dengan sumber daya alam yang semakin terbatas dan teknologi yang semakin maju, perusahaan harus dituntut semakin cepat beradaptasi dengan teknologi apabila ingin memiliki bisnis yang berkelanjutan

4. PSAK 57

SDGs menitikberatkan kepedulian perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup sehingga kegiatan ekonomi perusahaan dapat terus berlangsung dengan lestari. Perusahaan yang berkomitmen terhadap SDGs seharusnya tidak lagi menggunakan cara – cara yang non – etis yang dapat merusak lingkungan seperti pembakaran hutan untuk persiapan lahan perkebunan.

5. PSAK 60

Sebagai contoh jika anda adalah sebuah bank yang di mana mayoritas nasabah anda adalah perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur. Kenaikan suhu bumi dua derajat yang muncul akibat pemanasan global dan perusakan lingkungan, hal ini dapat sangat mempengaruhi bisnis para nasabah anda di masa depan.

Kenaikan suhu ini dapat menimbulkan kekeringan di beberapa negara tempat nasabah anda beroperasi atau akibat peningkatan suhu juga dapat mencairkan es di kutub yang berakibat naiknya permukaan air laut dan banjir di beberapa kota. Semua perubahan iklim ini adalah risiko bisnis yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur namun juga perusahaan pembiayaan.

6. PSAK 71

Dengan mempertimbangkan kemungkinan – kemungkinan gagal bayar sepanjang usia instrumen keuangan, contohnya usia instrumen keuangan yang panjang misalnya, pinjaman jangka panjang juga menuntut pemberi pinjaman untuk mempertimbangkan risiko – risiko lingkungan yang kemungkinan akan terjadi. Seperti dalam contoh PSAK 60 yang kita bahas sebelumnya dimana suhu bumi yang hanya meningkat dua derajat saja dapat memberikan dampak yang cukup signifikan pada perusahaan maupun para penduduk dunia.

B. Pemecahan Masalah

1. PSAK 19

Perusahaan dapat membuat inovasi berupa produk bersertifikasi ramah lingkungan dan lebih hemat energy. Kebutuhan ini dapat direspon oleh dunia bisnis dengan menjadikan kegiatan riset dan pengembangan dalam produk baru misalnya, penciptaan kemasan produk ramah lingkungan dan tidak menggunakan plastik tetapi bisa menggantinya dengan kertas atau bahan lainnya yang ramah lingkungan.

2. PSAK 24

Menyetarakan tingkat upah bagi buruh perempuan dan laki – laki membawa konsekuensi langsung terhadap beban imbalan kerja perusahaan, namun dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dan yang kedua kesetaraan jender bukan hanya issue upah perempuan yang disetarakan dengan laki – laki namun juga memberikan benefit yang setara untuk pekerja laki – laki, misalnya terkait dengan cuti melahirkan tiga bulan yang tidak dinikmati oleh karyawan laki – laki. Hal ini banyak dikritik mengingat para Bapak juga terkana dampak dari kehadiran bayi dalam keluarga (seperti rasa lelah dan kurang tidur). Banyak perusahaan yang seharusnya juga memberi hak cuti bagi karyawan laki – laki yang baru menjadi ayah.

3. PSAK 48

Salah satu contoh yang dapat diaplikasikan adalah teknologi baru pengolahan limbah yang di anjurkan (atau bahkan disyaratkan) pemerintah membuat instalasi pengolahan limbah yang dimiliki perusahaan menjadi usang.

4. PSAK 57

Perusahaan harus berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan kualitas limbah yang dibuang ke sungai, atau kualitas emisi karbon, atau biaya – biaya terkait kelestarian lingkungan lainnya. Pemerintah juga seharusnya memberikan perusahaan benefit berupa penghargaan atau keuntungan lainnya yang dapat memberikan perusahaan – perusahaan semangat untuk selalu berkomitmen menjalankan SDGs.

5. PSAK 60

Risiko lingkungan harus dikelola dengan baik dan diungkapkan oleh perusahaan terutama bila terkait dengan instrumen keuangan. Cara yang dapat digunakan adalah dengan menciptakan taman di sekitar perusahaan dan mengajak para pegawai perusahaan untuk menanam pohon bersama.

6. PSAK 71

Dengan adanya kebijakan dan sanksi tegas bagi perusahaan maupun konsumen yang melakukan kegiatan produksi serta konsumsi yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, akan menekan dan meminimalisir dampak dari kerusakan lingkungan.

Selain itu, perusahaan dibidang tertentu seperti mobil dan motor harus bisa membuat inovasi kendaraan yang ramah lingkungan. Pemerintah juga harus memajukan dan mendukung para anak bangsa yang berbakat khususnya dalam penciptaan inovasi yang dapat menjaga dan menciptakan kelestarian bumi.

A. Analisis dan Sintesis

1. Analisis Peran Akuntan Dalam Upaya Pencapaian SDGs

Akuntansi memiliki peran penting dalam pencapaian SDGs (IFAC 2016; ACCA 2017; Makarenko & Plastun 2017). Akuntan berperan menjadi “value Reporter” yang melaporkan nilai – nilai perusahaan kepada stakeholders, selain sebagai penyusun laporan, akuntan juga berperan sebagai “value keeper” yang menjaga perusahaan tetap pada komitmennya dalam mencapai nilai – nilai yang sudah dijadikan visi dan misi perusahaan.

Tanpa peran akuntan, target-target SDG mungkin hanya menjadi slogan-slogan cantik dalam laporan perusahaan. Akuntan harus membangun awareness perusahaan dan sektor swasta pentingnya memasukkan SDGs dalam strategi perusahaan mereka. Bukan untuk gagah gagahan tapi karena memang hal tersebut akan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Lihatlah perusahaan-perusahaan dunia yang langgeng sampai ratusan tahun, biasanya adalah mereka yang setia menjunjung etika dan kelestarian lingkungan.

2. Analisis Peran Perusahaan Untuk Berpartisipasi Dalam Pencapaian SDGs

Seperti yang telah dijabarkan di atas mengenai PSAK peran perusahaan dalam upaya pencapaian SDGs adalah Perusahaan dapat membuat inovasi berupa produk bersertifikasi ramah lingkungan dan lebih hemat energi, menyetarakan tingkat upah bagi buruh perempuan dan laki – laki serta juga memberikan benefit yang setara untuk pekerja laki – laki, mengaplikasikan teknologi baru pengolahan limbah yang di anjurkan (atau bahkan disyaratkan) pemerintah dan membuat instalasi pengolahan limbah, menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan kualitas limbah yang dibuang ke sungai, atau kualitas emisi karbon, atau biaya – biaya terkait kelestarian lingkungan lainnya.

Kesulitan perusahaan dalam mentautkan target SDG ke dalam strategi perusahaan disambut oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Saat ini telah tersedia beberapa alat yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memasukkan konsep konsep SDG dalam strategi perusahaan dan pelaporan. Beberapa framework yang dapat digunakan oleh perusahaan tertera dalam tabel.

Tabel 2. Framework yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai SDGs

Nama Framework/Model/Standar	Badan Penerbit
1. SDG Compass (2015)	The World Business Council for Sustainable Development (WBSCD), The UN Global Compact (UNGC) dan GRI
1. <IR> Framework Five-step approach (dalam dokumen : The Sustainable Development Goals, Integrated Thinking and the Integrated Report)	Carol Adams yang mengembangkan model dari framework IIRC (International Integrated Reporting Council)
1. GRI UNGC Business Reporting on SDGs (2017)	GRI (General Reporting Initiatives) dan UNGC (United Nation Global Compact)
1. UCTAD ISAR Core Indicators	United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Reporting and Accounting (ISAR)

Sumber : <http://etw-accountant.com/dampak-sdgs-dalam-laporan-keuangan-dan-peran-penting-akuntan/>

3. Analisis Peran Pemerintah Dalam Proses Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan beberapa program-program orientasi kepada setiap kepala daerah dan DPRD provinsi/kabupaten/kota mengenai kebijakan-

kebijakan strategis di tingkat nasional yang memuat tujuan pembangunan berkelanjutan yang nantinya harus diaktualisasikan dan dilaksanakan di daerah. untuk memaknai dan memahami pembangunan berkelanjutan sebagai suatu pembangunan yang fokusnya untuk pemenuhan hak-hak masyarakat dan untuk pencapaian SDGs.

B. Alternatif dan Gagasan Penyelesaian Masalah

Salah satu hal yang paling efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memanfaatkan dan mengalokasikan pajak yang diperoleh pemerintah dari perusahaan untuk pembangunan daerah pelosok – pelosok yang masih tertinggal.

Oleh karena itu, hal pertama yang harus ditegaskan dan dilakukan tanpa henti adalah memberantas tindakan korupsi, agar pendapatan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya, pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat yang secara otomatis dapat mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Sehingga kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan pun menjadi berkualitas, air bersih dan sanitasi layak, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yaitu, mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua. Hingga pada akhirnya infrastruktur kuat, dan berkurangnya kesenjangan di antara daerah – daerah di bumi pertiwi ini.

Kesimpulan

Untuk mencapai suatu hal khususnya Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) bukanlah hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga merupakan tugas seluruh masyarakat dunia khususnya pemerintah dan perusahaan (yang dibantu oleh akuntan) dalam visi misinya untuk mencapai SDGs. Melalui akuntabilitas, transparansi dan rasa saling percaya serta komitmen dari semua pihak maka niscaya apa pun pasti akan tercapai.

Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat membuat perusahaan – perusahaan mau untuk ikut berpartisipasi dalam pencapaian SDGs. Pemerintah juga harus memberikan apresiasi terhadap perusahaan – perusahaan yang ikut berpartisipasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memberikan penghargaan dan insentif salah satunya potongan dalam pembayaran pajak. Hal ini dapat memberikan semangat bagi perusahaan untuk ikut melaksanakan SDGs.

Perusahaan – perusahaan juga harus senantiasa berkomitmen dalam pencapaian SDGs dengan terus melaksanakan hal – hal yang tercantum dalam PSAK di atas dan mengajak para karyawan untuk ikut melestarikan lingkungan dengan menghemat penggunaan kertas dan menanam pohon. Selain itu, hal yang dapat dilakukan perusahaan adalah mengajak para karyawannya untuk mengikuti kegiatan sosial sehingga dapat menciptakan rasa syukur dan kepedulian mereka menyangkut kemiskinan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

ACCA, 2017. *The Sustainability Development Goals: Redefining context, risk and opportunity*. Diakses tanggal 5 Mei 2018. Tersedia di http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/professional-insights/The-sustainable-development-goals/pi-sdgs-accountancy-profession.pdf

<https://dconsultingbusinessconsultant.com/psak-no-19-aset-tidak-berwujud/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi>

https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangun_Berkelanjutan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan)

<https://www.coursehero.com/file/13845927/Resume-PSAK-60/>

<https://www.coursehero.com/file/22674008/PSAK-24-Imbalan-Kerja-ready/>

https://www.researchgate.net/publication/321784777_PERAN_AKUNTAN_BERBASIS_VA_LUES_DRIVEN_ACCOUNTING_SEBAGAI_UPAYA_PENCIPTAAN_DAYA_SAING_BERKELANJUTAN

IFAC, 2016. The 2030 Agenda for Sustainable Development. Diakses tanggal 5 Mei
20tainingable-development

Makarenko,I and Plastun,A, 2017. The role of accounting in sustainable development. *Accounting and Financial Control* (openaccess) , 1 , 4-12

PWC, 2017. *SDGs Reporting Challenge 2017*. Diakses tanggal 27 Maret 2018. Tersedia di <https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/pwc-sdg-reporting-challenge-2017-final.pdf>

United Nations. (2016). UN Global Compact and Accenture Strategy 2016 CEO Study. Diakses tanggal 27 Maret 2018. Tersedia di <https://www.accenture.com/us-en/insight-unglobal-compact-ceo-study>.